

PERENCANAAN TERSINERGI; KOLABORASI KAMPUNG, PUSKESMAS DAN SEKOLAH UNTUK PENINGKATAN LAYANAN DASAR DI PAPUA DAN PAPUA BARAT



Oleh : Halia Asriyani (Knowledge Management Officer Landasan II)

MENYUSUN PERENCANAAN
BERSINERGI - 2

PENGAJIAN KEADAAN
KAMPUNG DAN IDENTIFIKASI
MASALAH - 3

MUSYAWARAH
KAMPUNG; BERSINERGI
UNTUK PEMECAHAN MASALAH
BERSAMA - 4

MENYUSUN BERSAMA
PROGRAM YANG
DISEPAKATI - 5

PERENCANAAN
RESPONSIF GENDER DAN
INKLUSI SOSIAL - 6

LANGKAH
AWAL UNTUK PERUBAHAN - 7

“Anak-anak di kampung ini jarang masuk sekolah. Kalau kami ketemu mereka di luar, mereka bilang malas pergi sekolah. Saat kami tanya mama sama bapak bilang apa, mereka jawab kalau dorang bilang kasi tinggal saja sudah! Di sini kami sedih. Kami menganggap kalau kesadaran orang tua memang juga kurang. Padahal pendidikan itu penting untuk anak-anak kita,” ungkap Herlina S. Silubun, Guru SD YPPK St. Martinus de Pores Ayam. “Anak-anak itu wajib sekolah. Kami minta Bapak Kepala Kampung buatkan peraturan soal ini, bisakah tidak?” tanya Bu Herlina.

“Kampung siap demi meningkatkan sumber daya manusia di kampung,” jawab Yunus Askoman, Kepala Kampung Wawcesau.

Demikianlah sekilas diskusi dalam forum musyawarah kampung di Kampung Wawcesau, Distrik Akat, Kabupaten Asmat Provinsi Papua. Proses musyawarah kampung untuk penyusunan RPJMK ini dilakukan secara bersinergi dengan sekolah dan Puskesmas.

MENYUSUN PERENCANAAN BERSINERGI

Bersinergi adalah bekerja bersama-sama untuk satu tujuan. Seperti itulah kampung, Puskesmas dan sekolah diharapkan berkolaborasi untuk kemajuan bersama. Jika selama ini masing-masing unit layanan membuat perencanaan dan bekerja sendiri, model perencanaan yang tersinergi menawarkan kolaborasi dalam menyusun dan memecahkan permasalahan. Mengingat bahwa masing-masing sektor memiliki keterbatasan dalam mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan. Tanpa bersinergi, akan sulit menghasilkan layanan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selesai dengan program peningkatan kapasitas unit layanan dan kampung, selanjutnya pada periode ini program KOMPAK-LANDASAN Fase II berfokus pada sinergitas upaya unit layanan dan masyarakat dalam menghadapi permasalahan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan akses masyarakat Papua dan Papua Barat terhadap pelayanan dasar (kesehatan dan pendidikan) yang berkualitas.

Untuk mewujudkan peningkatan layanan dasar yang berkualitas bagi masyarakat, Program KOMPAK-LANDASAN menutup bulan Februari ini dengan melaksanakan agenda Pendampingan Sinergitas Perencanaan Kampung dan Unit Layanan di Provinsi Papua dan Papua Barat, Kegiatan dimulai dari Kabupaten Kaimana pada 2-6 Februari 2020 yang dilaksanakan di Kampung Marsi, Distrik Kaimana Papua Barat. Kegiatan pendampingan sinergitas selanjutnya dilakukan di Kabupaten Fakfak, tepatnya di Kampung Tanama, Distrik Pariwari Papua Barat pada 17-21 Februari, kemudian dilanjutkan di Kampung Malaumkarta, Distrik Makbon, Kabupaten Sorong Papua Barat pada 24-28 Februari. Di Kabupaten Jayapura, pendampingan dilaksanakan di lima kampung dalam wilayah Distrik Demta yaitu Kampung Yakore, Demta, Kamdera, Ambore dan Yaugapsa.

Kegiatan pendampingan juga dilaksanakan di Kampung Wawcesau, Distrik Akat Kabupaten Asmat dan di Kampung Sokanggo, Distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel pada 24-27 Februari. Di Kabupaten Nabire, kegiatan pendampingan sinergitas perencanaan diadakan di Kampung Waharia, Distrik Teluk Kimi pada 25-28 Februari.



Herlina S. Silubun dari SD YPPK St. Martinus de Pores Ayam memaparkan masalah pendidikan pada Musywarah Kampung Wawcesau, Kabupaten Asmat.

“

*Bersinergi adalah
bekerja bersama-sama
untuk satu tujuan*

Melalui sinergitas perencanaan ini akan lahir usulan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) dan Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK); Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Puskesmas; Rencana Kerja Sekolah (RKS), Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), serta Rencana Kerja Tahunan (RKT) sekolah. Semua dokumen perencanaan ini nantinya akan menjadi dasar dalam melakukan kegiatan pembangunan di wilayah kampung masing-masing. Juga kegiatan pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat oleh Puskesmas dan sekolah.

Di Kampung Waroser, Distrik Oransbari Kabupaten Manokwari Selatan Papua Barat, kegiatan pendampingan sinergitas telah dilakukan pada akhir tahun 2019. Kampung ini bahkan telah menghasilkan dokumen RPJMK dan RKPK yang juga telah disosialisasikan kepada seluruh masyarakat.

Kegiatan pendampingan sinergitas perencanaan ini melibatkan orang-orang yang memang berperan dalam penyusunan perencanaan kampung, Puskesmas dan sekolah sebagai subyek utama. Dalam proses perencanaan tersebut, mereka didamping oleh fasilitator kabupaten. Fasilitator kabupaten adalah mereka yang telah mengikuti kegiatan Training of Trainer (ToT) Sinergitas Perencanaan Kampung, Puskesmas dan Sekolah untuk Peningkatan Layanan Dasar yang juga dilaksanakan oleh program KOMPAK-LANDASAN di Provinsi Papua dan Papua Barat pada November 2019 lalu. Para fasilitator ini masing-masing mewakili sektor kampung, kesehatan dan pendidikan.

PENGAJIAN KEADAAN KAMPUNG DAN IDENTIFIKASI MASALAH

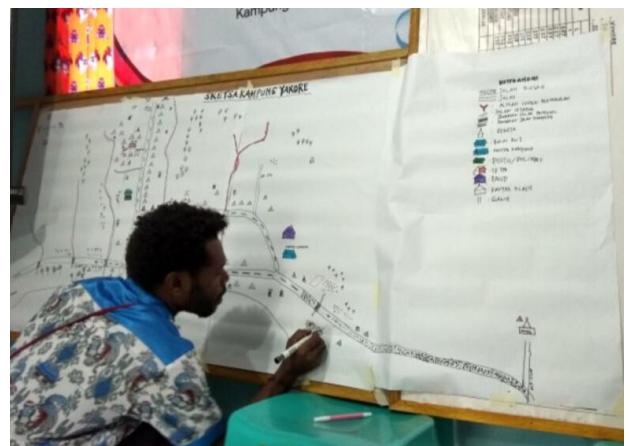
Proses perencanaan bersinergi ini sama sekali tidak mengubah tahapan proses perencanaan yang selama ini berjalan. Hal yang dilakukan adalah mengatur waktu dari masing-masing proses perencanaan, sehingga tahapan-tahapan analisa permasalahan dan perencanaan tindakan untuk mengatasi masalah dapat saling dihubungkan dan disinergikan.

Memulai proses perencanaan, pengkajian keadaan kampung dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi kampung. Proses ini penting sebelum menentukan permasalahan. Hal ini agar masalah yang diidentifikasi bisa sesuai dengan data dan kondisi yang benar-benar terjadi di kampung. Dasar informasi yang sama dalam melihat permasalahan akan menghasilkan analisis masalah yang lebih akurat. Dalam proses ini, data Sistem Administrasi dan Informasi Kampung (SAIK) juga sangat membantu dalam melakukan identifikasi.

Pengkajian keadaan kampung ini dikerjakan sendiri oleh masyarakat. Tahap ini dilakukan dengan menggunakan beberapa alat kaji diantaranya sketsa kampung yang berfungsi untuk melihat kondisi kampung secara fisik; kalender musim untuk melihat kondisi kampung dalam setiap musim yang ada; diagram kelembagaan untuk memetakan lembaga-lembaga formal maupun non formal yang ada di kampung beserta perannya masing-masing; dan sejarah kampung yang bertujuan untuk melihat perkembangan kampung dari waktu ke waktu. Hasil identifikasi dari semua alat kaji ini kemudian memunculkan daftar masalah dan potensi yang ada di kampung.

Tahap selanjutnya adalah memikirkan bersama beberapa pilihan solusi atas masalah yang telah teridentifikasi. Proses ini dilakukan secara partisipatif sehingga benar-benar berasal dari masyarakat. Selanjutnya adalah membuat prioritas dari solusi-solusi yang telah dirembukkan. Proses ini juga nantinya akan membantu untuk menentukan usulan kegiatan yang menjadi prioritas selanjutnya dapat menjadi program alternatif di tahun pertama yang diusulkan dalam RPKK.

Proses pengkajian keadaan kampung ini juga berlangsung di Puskesmas dan sekolah. Menggunakan data kesehatan dan pendidikan yang mereka miliki, Puskesmas dan sekolah mengidentifikasi permasalahan dan potensi yang mereka miliki. Hasil identifikasi ini selanjutnya akan dipaparkan dalam forum musyawarah kampung untuk mengklarifikasi sekaligus menyepakati masalah secara bersama-sama.



Proses pengkajian keadaan kampung (berurutan dari atas ke bawah)
Kabupaten Kaimana, Boven Digoel, Fakfak dan Jayapura

MUSYAWARAH KAMPUNG; BERSINERGI UNTUK PEMECAHAN MASALAH BERSAMA



Suasana Musyawarah Kampung Wawcesau, Distrik Akat Kabupaten Asmat

Musyawarah kampung merupakan momen penting dalam proses perencanaan. Pada tahap inilah sinergi antara kampung dan unit layanan dasar dalam melakukan perencanaan terjadi. Dalam musyawarah kampung, tim perencanaan dari Puskesmas dan sekolah hadir untuk memaparkan permasalahan yang mereka hadapi. Begitu pula kampung memaparkan permasalahan yang sudah mereka identifikasi. Tahap ini sekaligus mengklarifikasi masalah dan menyepakati solusi secara bersama-sama.

Permasalahan-permasalahan yang dipaparkan Puskesmas dan sekolah pun ditanggapi oleh kampung, begitu pula sebaliknya. Harapan dan kebutuhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan dan pendidikan di wilayah mereka dapat ditangkap dengan hadirnya unit layanan dalam musyawarah kampung. Begitu pula harapan dan kebutuhan dari unit layanan yang diharapkan oleh pemerintah kampung. Diskusi antara pihak kampung, Puskesmas dan sekolah mengenai program apa yang dapat dilakukan secara bersinergi ke depannya pun terjadi.

Di Kampung Tanama Kabupaten Fakfak misalnya, orang tua siswa mengeluhkan anak-anak mereka yang masih sulit membaca. Guru-guru sekolah dalam pemaparan masalahnya pun menyampaikan bahwa anak-anak sulit berkonsentrasi belajar karena musik yang dibunyikan terlalu keras oleh sejumlah warga di sekitar sekolah. “Butuh kesadaran dari kita semua soal musik ini. Itu sangat mengganggu. Kami mohon kerjasama dari masyarakat sekalian,” ungkap Natalia Laba, Guru SD INP Tanama. Atas kondisi ini, pemerintah kampung pun berinisiatif untuk melakukan sosialisasi dan membuat peraturan untuk tidak membunyikan musik saat jam pelajaran.

Sementara di Kabupaten Kaimana, berdasarkan data Pustu Kampung Marsi, sebanyak 80% ibu hamil tidak memeriksakan kesehatannya secara rutin dan tidak melahirkan di fasilitas kesehatan. Pihak puskesmas berulang kali memberikan sosialisasi mengenai hal tersebut namun tidak membuahkan hasil. Musyawarah kampung akhirnya menjadi wadah bagi Puskesmas mengemukakan hal tersebut. Mereka juga menyampaikan risiko yang akan timbul jika hal ini terus berlanjut. “Ibu-ibu mungkin merasa lebih nyaman di rumah saja. Dipikirkannya kami juga bisa datang membantu proses persalinan. Tapi tidak bisa kami bawa semua alat-alat kesehatan yang dibutuhkan kalau darurat. Belum lagi kondisi tempatnya tidak steril,” ungkap Hasrawati, Bidan Pustu Kampung Marsi. Akan hal itu, pihak kampung berjanji akan membuat peraturan kampung yang mewajibkan ibu hamil memeriksakan kandungan secara rutin dan melahirkan di fasilitas kesehatan yang tersedia.

Melalui musyawarah kampung, banyak pihak yang mulai terbuka untuk mengungkapkan permasalahan dan harapan mereka. Memang banyak masalah penting yang memerlukan peran berbagai pihak untuk menyelesaikannya.



Suasana Musyawarah Kampung Yakore, Distrik Demta Kabupaten Jayapura



Pemaparan masalah dari sektor pendidikan pada Musyawarah Kampung Tanama Kabupaten Fakfak



Peserta kegiatan pendampingan sinergitas perencanaan di Kabupaten Fakfak memulai proses pengkajian keadaan kampung

“

Dengan bersinergi, selain membahas masalah bersama-sama, pembagian peran untuk mengatasinya dapat dilakukan.

MENYUSUN BERSAMA PROGRAM YANG DISEPAKATI

Seusai pemaparan masalah dan identifikasi solusi yang dilakukan dalam musyawarah kampung, para peserta kembali berembuk dalam kelompok sektor. Mereka mengulas kembali potensi solusi atas masalah berdasarkan masukan-masukan yang disampaikan dalam musyawarah kampung. Selanjutnya akan dihasilkan usulan program yang kembali akan dipaparkan untuk mendapatkan masukan dari forum.

Di Kampung Waharia, Kabupaten Nabire, diketahui bahwa sering kali kader Posyandu Balita dan Lansia kurang aktif menjalankan tugas karena menerima insentif yang sangat minim. Di sisi lain, balita dan lansia di kampung perlu terus dipantau kesehatan dan kesejahteraannya. Atas permasalahan ini, Pemerintah Kampung bersedia menaikkan dana insentif bagi kader. Sementara Puskesmas akan memantau keaktifan kader dan memberikan beragam pelatihan yang dibutuhkan.

Di Kampung Sokanggo, Kabupaten Boven Digoel, sekolah mengalami kekurangan tenaga pengajar sehingga proses belajar tidak dapat berjalan efektif. Pengadaan guru honorer terbentur tingginya biaya akomodasi yang tidak dapat ditanggung oleh sekolah. Akhirnya kampung dan sekolah sepakat untuk bekerja sama. Sekolah akan menanggung biaya honor guru dan kampung akan menanggung biaya akomodasinya.

Lain lagi permasalahan yang dihadapi Kampung Malaumkarta Kabupaten Sorong. Tidak adanya Unit Kesehatan Sekolah (UKS) menjadi masalah ketika ada siswa yang sakit pada jam belajar. Kampung kemudian menyepakati akan menyediakan bantuan sarana dan prasarana kesehatan bagi sekolah. Sedangkan Puskesmas bersedia melatih pengelolaan dan pelaksanaan UKS bagi sekolah. Demikianlah proses perencanaan tersinergi di antara unit layanan. Ada pembagian peran dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi bersama.



Proses identifikasi masalah di Kampung Yakore, Kabupaten Jayapura



Salah satu peserta Musyawarah Kampung Sokanggo, Kabupaten Boven Digoel sedang menyampaikan pendapat.

PERENCANAAN RESPONSIF GENDER DAN INKLUSI SOSIAL

Perencanaan responsif gender dan inklusi sosial menjadi satu sorotan penting dalam pendampingan sinergi perencanaan ini. Sebagaimana strategi nasional tentang pengarusutamaan perencanaan dan penganggaran responsif gender yang mengamanatkan untuk semua kementerian dapat menerapkannya di berbagai level, mulai dari nasional hingga kampung.

Di semua kabupaten, perempuan-perempuan terlibat dalam setiap tim perencanaan baik kampung, Puskesmas maupun sekolah. Keterlibatan perempuan ini menjadi satu kemajuan dan faktor penting dalam mengupayakan perencanaan yang responsif gender. Integrasi gender dan kelompok rentan dalam proses perencanaan ada pada aksesibilitas, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat. Semua sektor harus berperan untuk memastikan integrasi tersebut terjadi.

Di Kabupaten Fakfak, pelatihan pengelolaan bahan makanan yang berlimpah di kampung hendak diberikan bagi warga perempuan untuk menunjang ekonomi keluarga dan mengaktifkan perekonomian kampung. BUMDes yang telah dibentuk di wilayah ini kelak akan membantu memasarkan produk yang telah dihasilkan.

Para lansia juga menjadi perhatian dalam beragam program pembangunan yang diusulkan di semua kampung, baik Papua maupun Papua Barat. Kampung yang belum memiliki Posyandu Lansia tergerak untuk merencanakan pembentukannya. Sedangkan bagi anak-anak, semua kampung menargetkan tidak ada lagi kasus gizi kurang pada tahun berikutnya.



Tim Puskesmas Makbon, Kabupaten Sorong sedang melakukan analisa masalah.



Facilitator Kabupaten Boven Digoel sedang memberikan arahan dalam menyusun program kegiatan.



Peserta pendampingan sinergitas perencanaan di Kampung Tanama, Kabupaten Fakfak sedang melakukan identifikasi masalah.

Integrasi gender dan kelompok rentan dalam proses perencanaan ada pada

- aksesibilitas
- partisipasi
- kontrol dan
- perolehan manfaat.

LANGKAH AWAL UNTUK PERUBAHAN

Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) bersama Puskesmas dan sekolah adalah hal yang benar-benar baru bagi peserta kegiatan. Hal yang sama juga dialami oleh perwakilan Puskesmas dan sekolah. Ini adalah pengalaman pertama bagi mereka berpartisipasi dalam musyawarah kampung. Diungkap oleh Saul Kosai, Kepala Kampung Yaugapsa, Kabupaten Jayapura “Diskusi dalam Musrenbang kampung memang pernah dilakukan. Namun tidak seperti yang saat ini didorong oleh LANDASAN di mana sekolah dan Puskesmas dipertemukan dengan kampung untuk mengkaji masalah dan merumuskan pemecahannya bersama-sama. Proses seperti ini, akan kami budayakan dan jadikan mekanisme kerjasama dalam Kampung Yaugapsa.”

Kegiatan pendampingan sinergi perencanaan antara kampung dan unit layanan dasar yaitu Puskesmas dan sekolah menghasilkan rancangan program masing-masing sektor. Namun proses ini belum berakhir. Masih ada proses panjang yang akan dilalui oleh kampung untuk menghasilkan dokumen RPJMK. Begitu pula Puskesmas dan sekolah yang juga akan menyempurnakan dokumen perencanaan mereka. Selama itu, proses penyelesaian dokumen akan terus berjalan dengan didampingi oleh fasilitator lokal dan tim Program KOMPAK-LANDASAN. Dengan komitmen dari kampung, Puskesmas dan sekolah diharapkan sinergitas kampung dan unit layanan yang telah dibangun dapat berjalan baik di setiap kabupaten. Berjalannya perencanaan yang bersinergi antara pemerintah kampung dan unit penyedia layanan kesehatan dan pendidikan adalah pertama kalinya di Papua dan Papua Barat yang dapat menjadi teladan bagi banyak daerah lain di Indonesia. Tim KOMPAK-LANDASAN akan terus mendampingi dan mengawal proses perencanaan tersinergi ini untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat.



Peserta pendampingan sinergitas perencanaan di Kampung Marsi, Kabupaten Kaimana sedang memaparkan hasil identifikasi masalah kampung



Proses Musyawarah Kampung Sokanggo, Kabupaten Boven Digoel



Peserta dan fasilitator di Kampung Malaumkarta, Kabupaten Sorong sedang berdiskusi



Tim sektor kesehatan di Kampung Waharia, Kabupaten Nabire sedang melakukan identifikasi masalah